



**Menilik Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2027 untuk
Indonesia Tangguh: Di Mana Peran Kebebasan Ekonomi?**

Oleh:

Putu Rusta Adijaya

(Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)

The Indonesian Forum (TIF) seri 133

Kamis, 25 Juni 2026

KEM-PPKF 2027 Sudah Disepakati, Untuk ...

12 Juni 2026 • KOMSIT

Berita Utama



Pemerintah dan PPKF 2027: Target Lifting Migas

oleh Clara Anna Scholastica -
 Rabu, 17 Juni 2026 - 20:25 WIB



Presiden Prabowo Sampaikan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2027, Tekankan APBN sebagai Alat Perjuangan Bangsa

Anggota DPR sekaligus Ketua Badi **Rabu** • 20 Mei 2026 • 16.21

ro Kerangka RAPBN

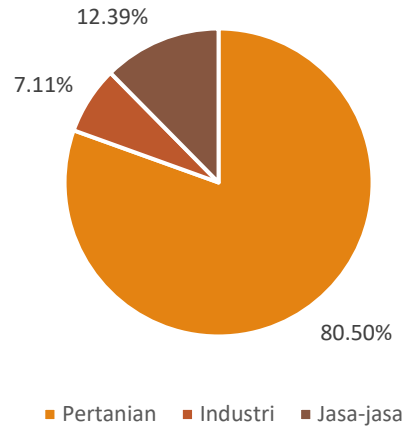


o dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027

Asumsi Dasar Ekonomi Makro			Kondisi Saat ini
Indikator	APBN 2026	KEM-PPKF 2027 yang Disetujui	
Pertumbuhan Ekonomi	5,4%	5,8%-6,5%	5,61% (Q1 2026, BPS)
Defisit	2,68%	1,8%-2,4%	2,92% (Kompas.id, 10/1/2026)
Inflasi	2,5%	1,5%-3,5%	3,08% (YoY Mei 2026)
Nilai Tukar Rupiah	Rp16.500 per USD	Rp16.800-Rp17.500 per USD	Rp17.950 (Tradingeconomics.com)
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,9%	6,5%-7,3%	7,22% (Tradingeconomics.com)
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	US\$70 per barel	US\$70-95 per barel	US\$106,56 per barel (KemenESDM, 6/6/2026)
Lifting Minyak	610 ribu barel per hari	605-620 ribu barel per hari	605,3 ribu barel per hari (KemenESDM, 8/1/2026)
Lifting Gas Bumi	984 ribu barel setara minyak per hari	951-990 ribu barel setara minyak per hari	951,8 ribu barel setara minyak per hari (KemenESDM, 9/1/2026)
Sasaran dan Indikator Pertumbuhan			Kondisi Saat ini
Indikator	APBN 2026	KEM-PPKF 2027 yang Disetujui	
Tingkat Kemiskinan	6,5%-7,5%	6%-6,5%	8,25% (persentase penduduk miskin, September 2025, BPS)
Rasio Gini	0,377-0,380	0,362-0,367	0,363 (September 2025, BPS)
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44%-4,96%	4,30%-4,87%	4,68% (Februari 2026, BPS)
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0%-0,5%	0%	0,78% (September 2025, KemenkoPMK)
Indeks Modal Manusia	0,57	0,575	0,54 (2020, Bank Dunia)
GNI per Kapita	US\$5.520	US\$5.800-US\$5.840	US\$4.204,8 (constant 2015 US\$, 2024), US\$4.910 (Atlas method US\$, 2024)
Indeks Kesejahteraan Petani	0,7731	0,8038	0,7445 (RPJMN 2025–2029)
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	35%	40,81%	42,20% (Persentase Tenaga Kerja Formal Perkotaan+Perdesaan, 2025, BPS)

Melihat Kondisi Ekonomi Desa di Indonesia

Persentase Desa/Kelurahan menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk



Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Sub-Sektor Pertanian Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk

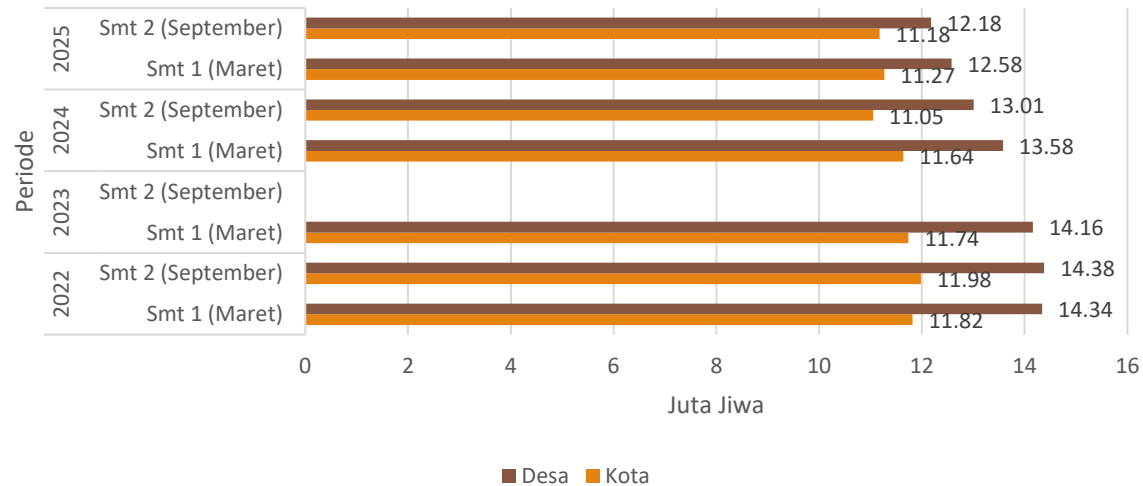
Tanaman Pangan	38148
Hortikultura	3674
Perkebunan	21336
Peternakan	318
Perikanan	3646
Kehutanan	343
Jasa Pertanian	267

80,38%
Desa/Kelurahan dengan Industri Mikro Kecil

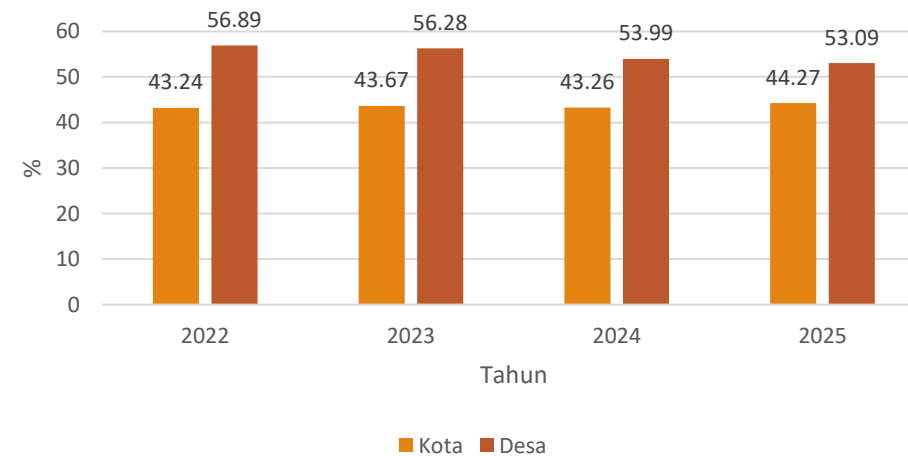
12,33%
Desa/Kelurahan dengan Bank

30,23%
Desa/Kelurahan dengan Koperasi

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)



Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian Menurut Daerah Tempat Tinggal



34,76%
Desa/Kelurahan dengan Sarana Perdagangan dan Akomodasi

Berbicara Mengenai Transfer Ke Daerah (TKD)

Rasio TKD 2,7% PDB Belanja P

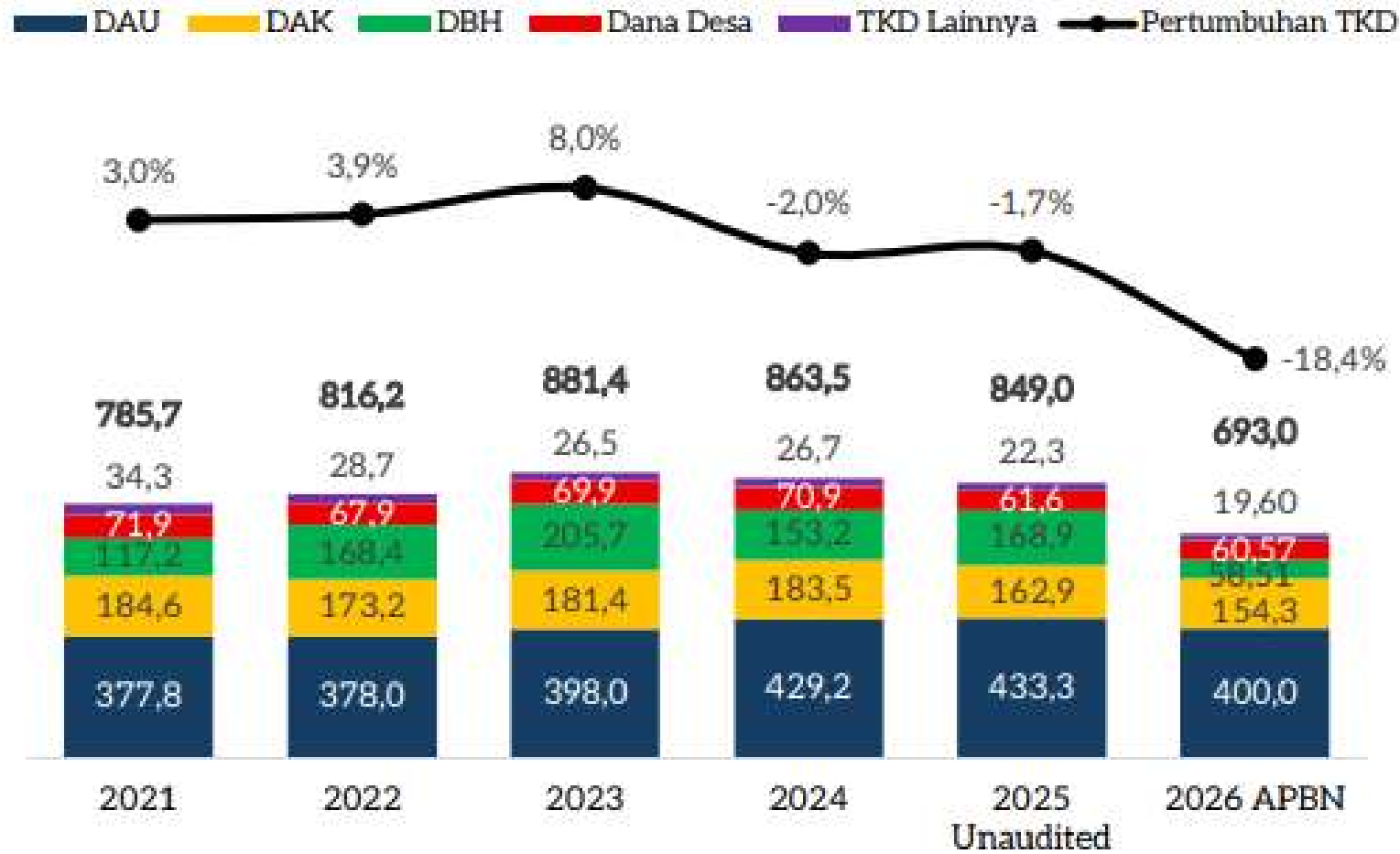
Kemenkeu menyatakan ditetapkan berkisar belanja pokok daerah publik.

Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Khairul Kahfi



Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta

Grafik 36. Perkembangan Transfer ke Daerah, 2021-2026 (Rp T)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

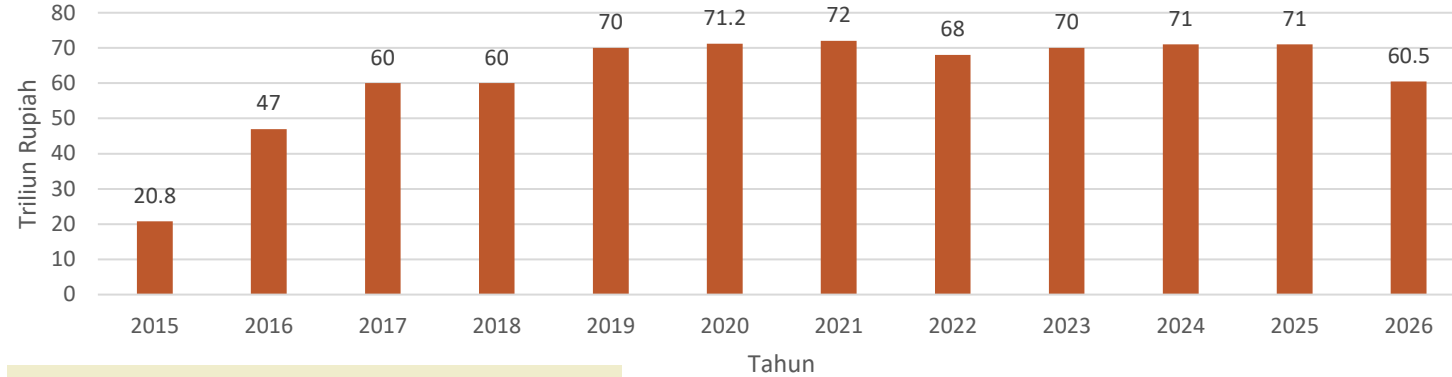
akan Anggaran



5) (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Perkembangan Dana Desa

Perkembangan Alokasi Dana Desa 2015-2026



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam menentukan alokasi Dana Desa, digunakan indikator dan data yang bersumber dari kementerian/ lembaga yang berwenang serta Pemerintah Daerah.

Apa saja?



Kementerian Dalam Negeri

Data jumlah Desa, nama & kode Desa, dan jumlah penduduk



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Data status Desa menggunakan Indeks Desa Membangun & APBDes



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Data angka kemiskinan Desa menggunakan jumlah penduduk miskin berdasarkan P3KE



Badan Pusat Statistik

Data luas wilayah Desa & tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa

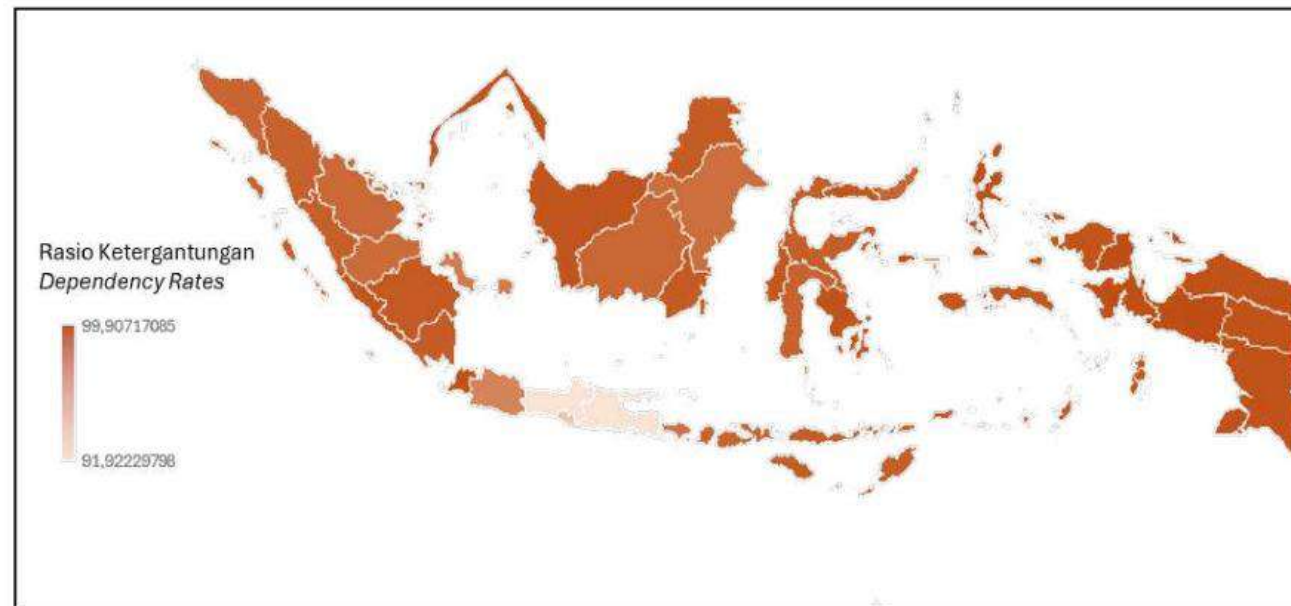


Kementerian Keuangan

Data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa & APBDes

Data yang digunakan untuk Penilaian Indikator Tambahan untuk Alokasi Kinerja dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

kemenkeu.go.id



Catatan/Notes: Estimasi berdasarkan Survei BPS/Estimation based on BPS Survey

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan terhadap pendapatan transfer di desa di Provinsi Papua Tengah: 99,91%.

Disusul desa di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat masing-masing: 99,84%.

Kebebasan Ekonomi untuk “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

- Kebebasan ekonomi mengacu pada **hak pilihan masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi** (Bronfenbrenner, 1955; Sen, 2002).
 - Apa barang atau jasa yang akan diproduksi, bagaimana cara produksi, kepada siapa barang dan jasa itu diproduksi.
- Landasan kebebasan ekonomi menurut Fraser Institute:
 - ❑ pilihan pribadi: termasuk bagaimana menggunakan dan menyimpan uang mereka.
 - ❑ Mengejar *self-interest* (*economic interest*) dan preferensi yang memaksimalkan *utility* (kepuasan).
 - ❑ pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar: individu/rumah tangga/dunia usaha berdagang dalam pasar -> pasar mengkoordinasikan penjual dan pembeli -> harga ditentukan oleh *demand* dan *supply*.
 - ❑ kebebasan untuk memasuki dan bersaing di pasar: *no restrictions or barriers* untuk bersaing -> mendorong inovasi, daya saing.
 - ❑ perlindungan terhadap seseorang dan harta bendanya dari agresi pihak lain: melindungi hak milik dari pencurian, penipuan -> menciptakan keamanan dan kepercayaan bagi individu.



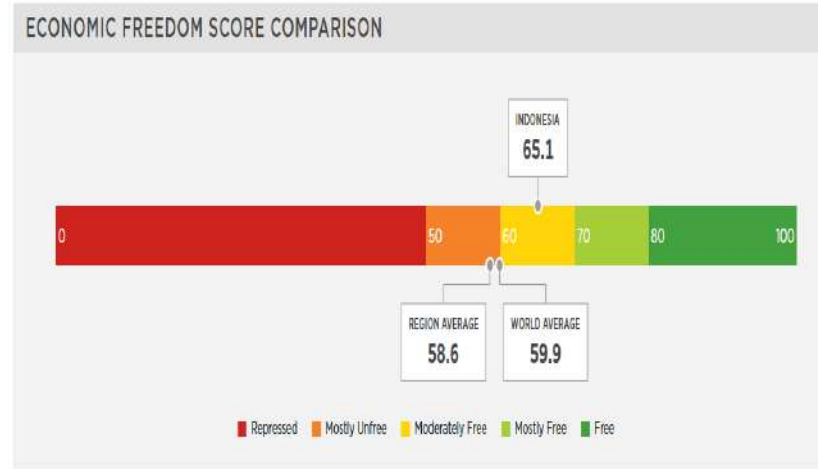
Gambaran Umum Kebebasan Ekonomi Indonesia Menurut The Heritage Foundation

ECONOMIC FREEDOM COUNTRY PROFILE

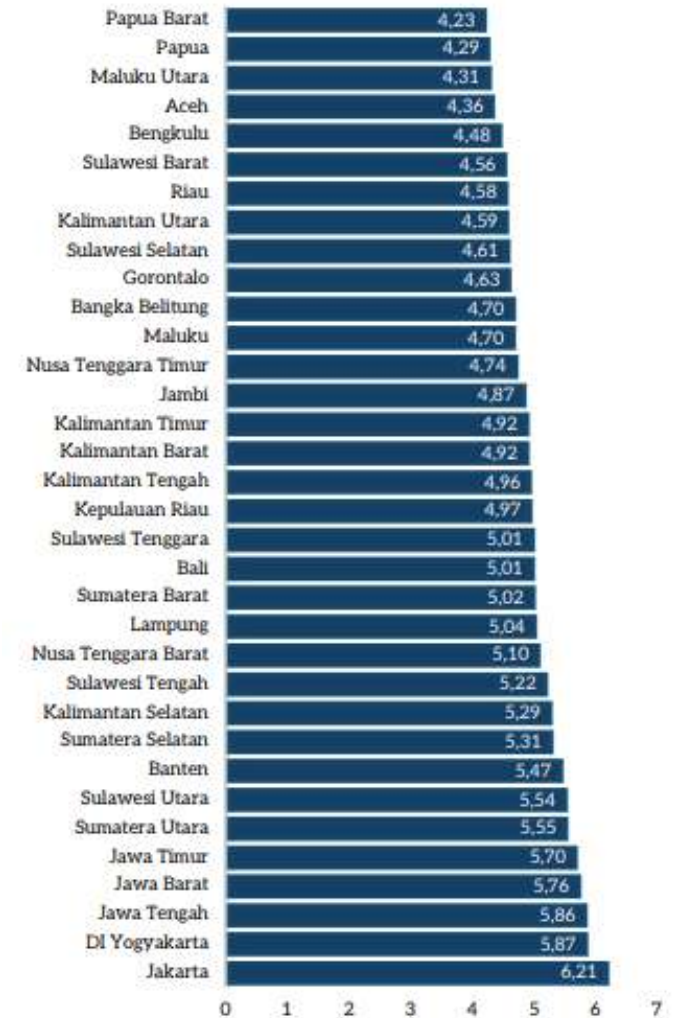
INDONESIA

Updated February 2026

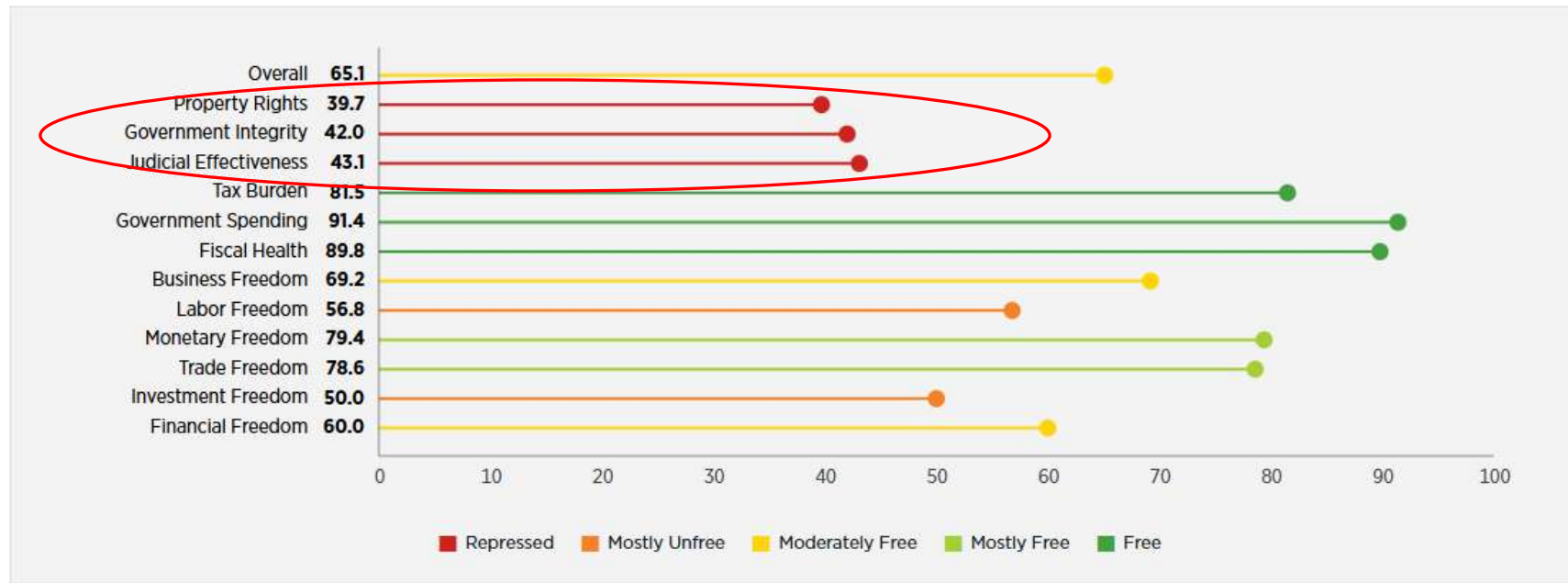
SCORE **65.1** WORLD RANK **60** STATUS **MODERATELY FREE**
(OUT OF 184 COUNTRIES)



Grafik 20. Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Wilayah di Indonesia



Sumber: KPPU, 2026

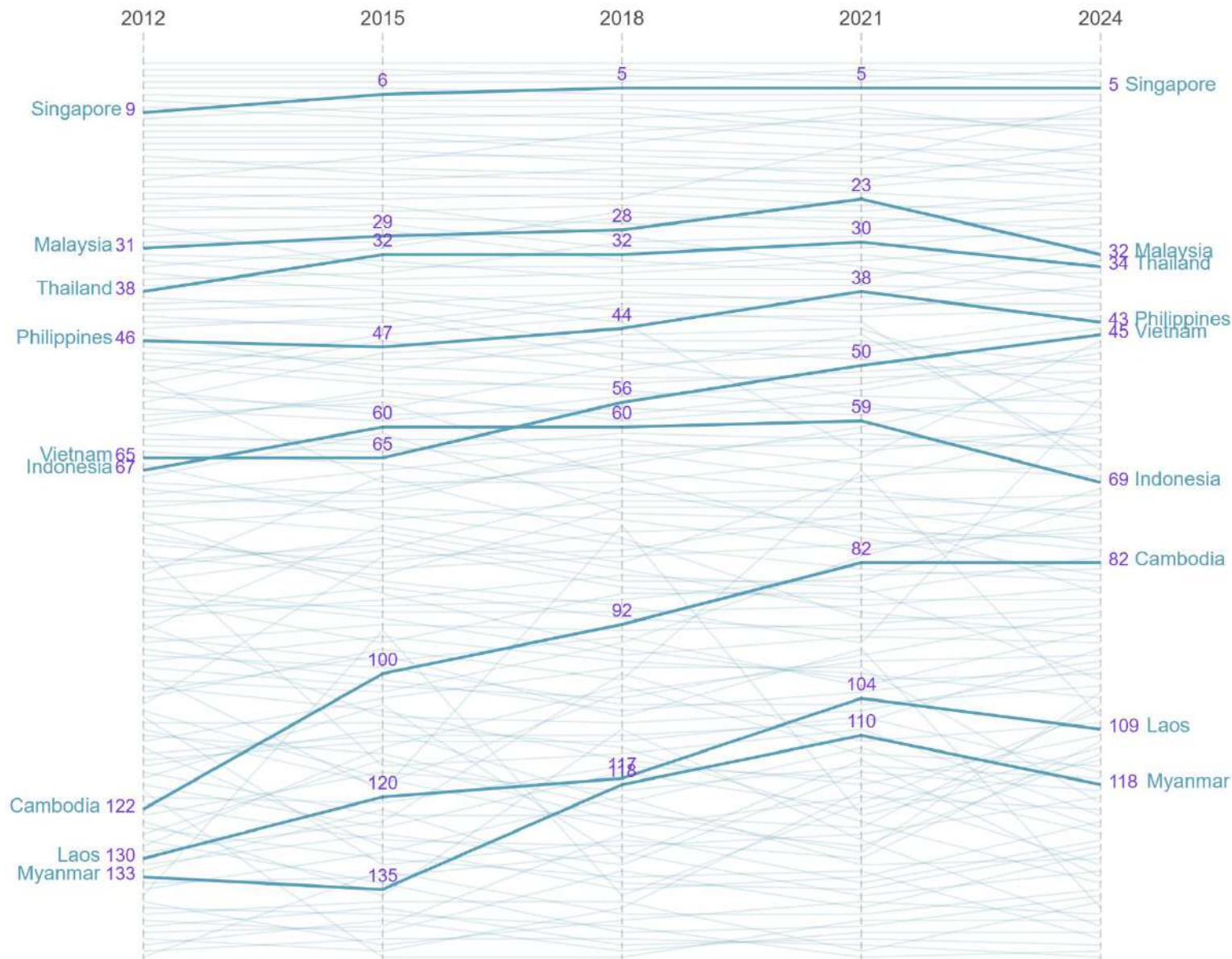


Tabel 1. Hasil Uji Kausalitas Granger

Rentang sampel: 1960-2025					
Lags: 4					
H0: ENCONSCAP tidak Granger-caused ECOFPRINT 0,3395		H0: GPCAP2015 tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,0728*		H0: LCSE tidak Granger-caused EF 0,4138	
H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,0234**		H0: ENCONSCAP tidak Granger-caused GPCAP2015 0,2667		H0: EF tidak Granger-caused LCSE 0,5317	
H0: GPCAP2015 tidak Granger-caused ECOFPRINT 0,9707		H0: HC tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,0862*			
H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused GPCAP2015 0,1080		H0: ENCONSCAP tidak Granger-caused HC 0,1534			
H0: HC tidak Granger-caused ECOFPRINT 0,5469		H0: EF tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,3826			
H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused HC 0,4619		H0: ENCONSCAP tidak Granger-caused EF 0,0011***			
H0: EF tidak Granger-caused ECOFPRINT 0,7725		H0: LCSE tidak Granger-caused ENCONSCAP 0,8329			
H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused EF 0,0180**		H0: ENCONSCAP tidak Granger-caused LCSE 0,0614*			
H0: LCSE tidak Granger-caused ECOFPRINT 0,3310		H0: HC tidak Granger-caused GPCAP2015 0,6452			
H0: ECOFPRINT tidak Granger-caused LCSE 0,0278**		H0: GPCAP2015 tidak Granger-caused HC 0,8376			
		H0: EF tidak Granger-caused GPCAP2015 0,0185**			
		H0: GPCAP2015 tidak Granger-caused EF 0,0002***			
		H0: LCSE tidak Granger-caused GPCAP2015 0,8700			
		H0: GPCAP2015 tidak Granger-caused LCSE 0,0106**			
		H0: EF tidak Granger-caused HC 0,1986			
		H0: HC tidak Granger-caused EF 0,0956*			
		H0: LCSE tidak Granger-caused HC 0,5203			
		H0: HC tidak Granger-caused LCSE 0,2635			

*, **, *** adalah signifikan di 10%, 5%, dan 1%. ECOFPRINT adalah jejak ekologis, ENCONSCAP adalah konsumsi energi per kapita, GPCAP2015 adalah Produk Domestik Bruto LGS 2015, HC adalah modal manusia, EF adalah kebebasan ekonomi, LCSE adalah low-carbon source energy.

Tumbuh Lebih Tinggi Melalui *Economic Complexity Index*

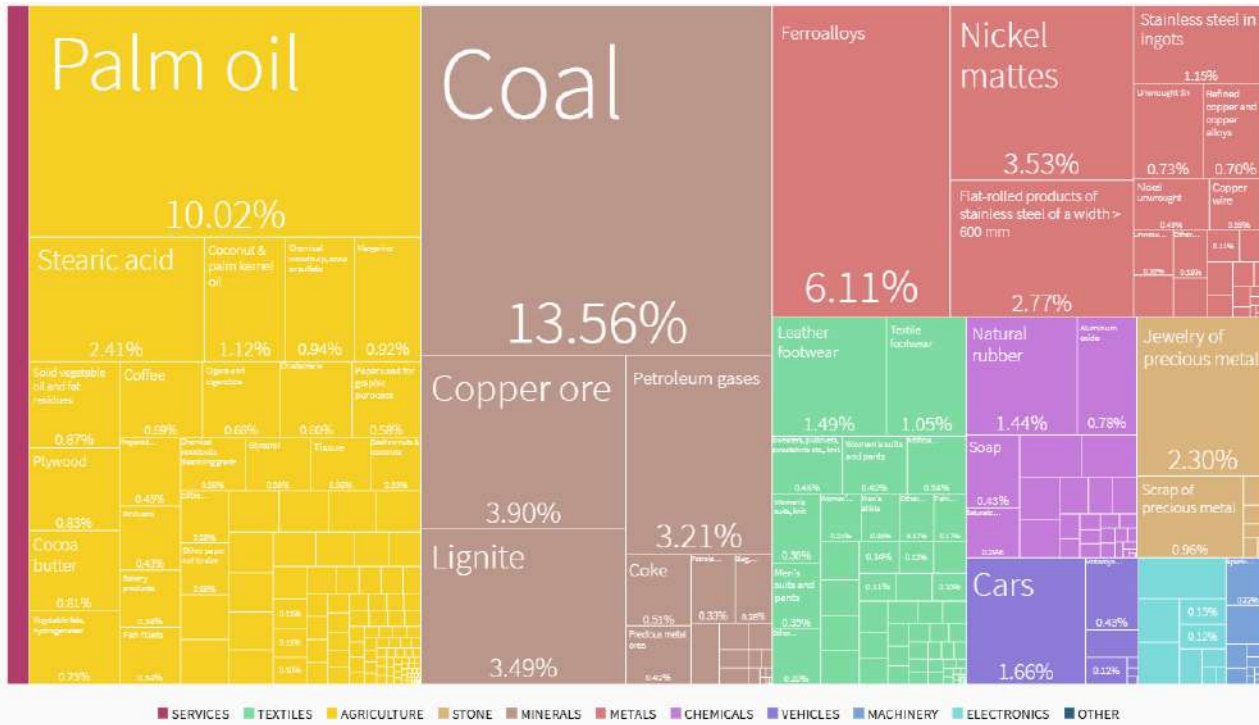


Adijaya (di *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Agustus 2024)

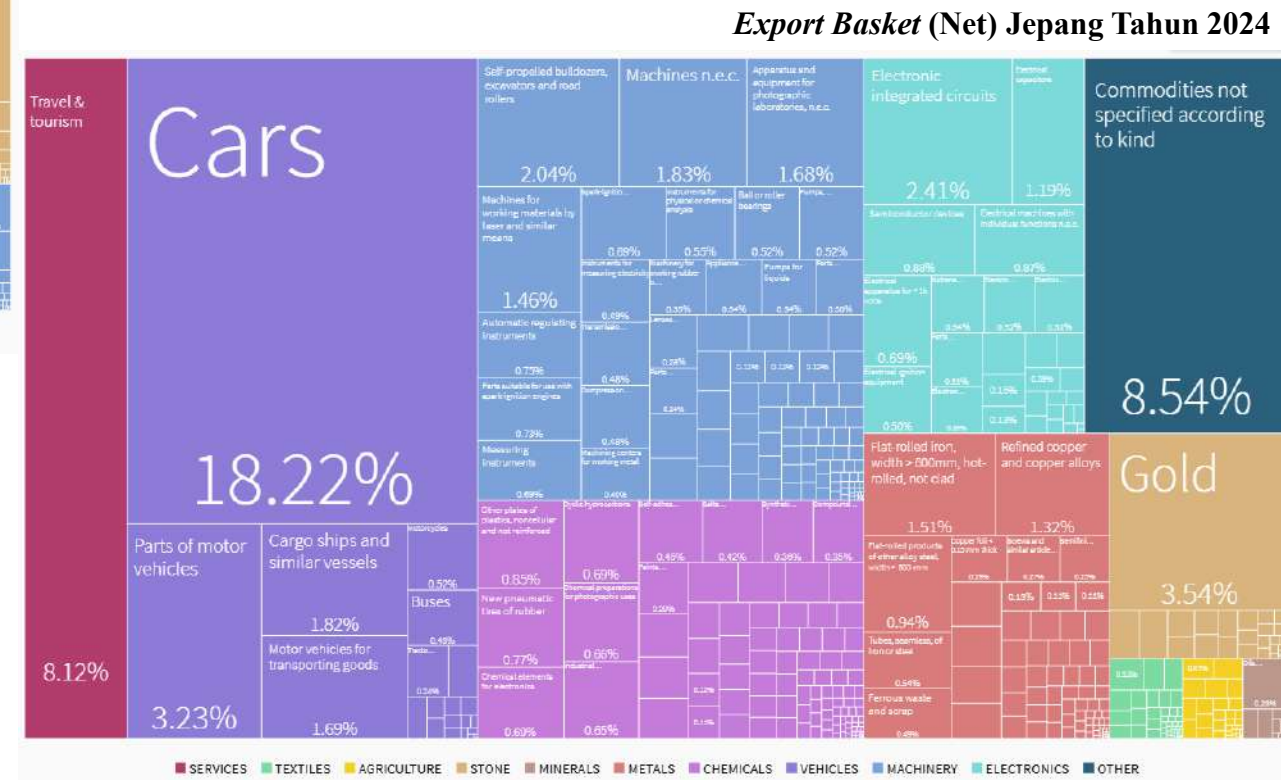
- *Economic complexity* negara diukur dengan menggunakan keragaman (*diversity*) ekspor yang diproduksi suatu negara, serta jumlah negara yang mampu memproduksinya (*ubiquity*).
- Juga dapat dikatakan **ukuran yang melihat kecanggihan dari ekonomi suatu negara, di mana semakin kompleks ekonomi suatu negara, seperti memiliki beragam pengetahuan produktif, maka semakin beragam dan semakin kompleks barang yang dihasilkan.**
- Hal ini dikarenakan Indonesia masih 'terjebak' dalam pengembangan produk berproduktivitas rendah yang ada di sektor mineral (contohnya, batu bara) dan sektor pertanian (contohnya, kelapa sawit).

Hal ini karena ***economic complexity* yang tinggi berkelindan dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan kemampuan yang lebih produktif.** Dengan adanya perbaikan *economic complexity*, diversifikasi ekonomi terjadi yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan indeks pembangunan manusia, baik bagi masyarakat kelas menengah maupun rentan.

Komparasi *Export Basket* Indonesia vs. Jepang



Export Basket (Net) Indonesia Tahun 2024





Ada Aturan Penguatan Institusi Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi , Tapi ...



SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TATA KELOLA EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS

Kekhawatiran:

1. Besarnya intervensi pemerintah, terutama dalam penunjukan entitas tunggal BUMN ekspor. Tetapi, penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dikhawatirkan akan mendorong praktik perburuan rente (*rent seeking*).
2. Nilai subkomponen kebebasan perdagangan Indonesia masih cukup baik menurut The Heritage Foundation (2026). Namun, jika kebijakan ekspor satu pintu tersebut tidak disertai dengan mekanisme transparansi harga dan pengawasan tata kelola yang optimal, hal tersebut dapat menurunkan skor subkomponen tersebut.

- Kebijakan ini diimplementasikan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan pembangunan nasional, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Kebijakan ini disebut ‘ekspor satu pintu’ karena pemerintah yang mengatur tata kelola ekspor seluruh komoditas sumber daya alam (SDA) strategis seperti yang dinyatakan Pasal 2 ayat (1). Adapun komoditas SDA strategis yang saat ini diatur tata kelola ekspornya adalah batu bara, kelapa sawit, dan *ferro alloy* (paduan besi).
 - 60% dari total ekspor nasional disumbang oleh ekspor SDA. Adapun tiga komoditas ekspor terbesar saat ini adalah batu bara dengan kontribusi 8,65%, *crude palm oil* (CPO) (8,63%), serta paduan besi (*ferro alloy*) sebesar 5,82%.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengatakan bahwa terkait BUMN Ekspor untuk melaksanakan kegiatan ekspor komoditas SDA strategis adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut diambil “sebagai komitmen nyata negara dalam memperkuat pengawasan, mendorong transparansi perdagangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi ketahanan ekonomi nasional.” (ekon.go.id, 31 Mei 2026).

Rekomendasi ini bukan dimaksudkan untuk membatalkan kebijakan ekspor satu pintu yang telah diimplementasi, melainkan sebagai himbauan penguatan untuk memperkuat fondasi kelembagaan, transparansi tata kelola, dan kebebasan ekonomi guna mencapai tujuan baik secara berkelanjutan.

1. Pemerintah serta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) **harus bersama-sama menetapkan mekanisme harga yang transparan, independen, dan *real-time***. Hal ini dikarenakan PT DSI sebagai BUMN Ekspor dapat menentukan harga jual komoditas SDA strategis berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (PP 24/2026). Selain melindungi pelaku usaha, transparansi terkait harga maupun terkait penarikan margin keuntungan dalam skema ekspor sumber daya alam adalah untuk menjaga persepsi pasar terhadap keterbukaan perdagangan Indonesia guna menjaga skor *trade freedom* berdasarkan The Heritage Foundation.
2. Seluruh elemen pemerintah **harus memastikan bahwa peran PT DSI tidak memonopoli penjualan atau menjadi ‘calo’ atau menjadi entitas monopoli baru**. Hal ini penting agar tetap membuka ruang bagi eksportir swasta, serta menjaga market mechanism negosiasi antara mereka dengan pembeli yang ingin membeli dari pihak swasta.
3. Seluruh elemen pemerintah harus dapat **memperkuat pengawasan terhadap PT DSI agar potensi *regulatory capture* dapat dimitigasi dengan baik**.
4. Seluruh elemen pemerintah **harus dapat melakukan pengawasan dan evaluasi berkala yang optimal guna mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan akan implementasi regulasi ini**. Evaluasi ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, asosiasi industri, dan masyarakat sipil secara inklusif. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan guna memitigasi praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi permasalahan struktural kelembagaan di Indonesia.

TERIMA KASIH

Instagram: @indonesian.institute Facebook:

The Indonesian Institute X: @the_indonesian

YouTube: The Indonesian Institute, Geolive

Website: www.theindonesianinstitute.com

Instagram Ngobi (Ngobrol Kebijakan) by The Indonesian Institute: @ngobi.podcast Spotify:

Ngobi (Ngobrol Kebijakan)